

Pragmatisme Politik Nahdlatul Ulama Pada Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo

Aji Sakti Hidayatullah^{1*}, Ahmad Chumeidi², Yusuf Fadli³, Adie Dwiyanto Nurlukman⁴

*Corresponding Author: ajsaktihidayat@gmail.com

^{1,2,3,4}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Tangerang

DOI: 10.22219/jurnalsospol.v8i2.22504

Abstract

This study aims to explain the political pragmatism of Nahdlatul Ulama in Joko Widodo administration. As a socio-religious organization with a strong mass base, it can accompany NU's political fluctuations, both internally and externally. Many consider the political actions of Nahdlatul Ulama (NU) to be pragmatic. In a sense, NU's political actions were motivated by the motivation to gain status and power because they were very pro-government in the past and in recent years, especially during the reign of President Jokowi. To answer this problem, Ekowati's theory of political pragmatism is used which is then supported by James S. Coleman's rational choice theory. The data were collected through the literature contained in books, journals and other online sources that are representative and relevant and analyzed qualitatively using a literature approach. This study concludes that in theory it is true that NU has taken pragmatic steps in politics. However, on the other hand, NU does all of this in accordance with the existing Qoidah Fiqh, and indeed NU's politics has never really departed from the foundations contained in Fiqh.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menjelaskan pragmatisme politik Nahdlatul Ulama pada masa pemerintahan Joko Widodo. Sebagai organisasi sosial keagamaan dengan basis massa yang kuat, dapat mengiringi fluktuasi politik NU, baik internal maupun eksternal. Banyak yang menilai aksi politik Nahdlatul Ulama (NU) itu pragmatis. Dalam artian tindakan politik NU didorong oleh motivasi untuk memperoleh status dan kekuasaan karena sangat pro-pemerintah di masa lalu dan beberapa tahun terakhir, terutama pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Untuk menjawab masalah ini, menggunakan teori dari Ekowati tentang Pragmatisme politik yang kemudian ditopang dengan teori pilihan rasional James S. Coleman. Data-data dikumpulkan melalui literatur yang termaktub pada buku, jurnal maupun sumber online lainnya yang representative serta relevan dan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Kajian ini menyimpulkan bahwa Secara teori memang benar NU melakukan langkah pragmatismenya dalam politik. Namun, disisi lain juga NU melakukan semua ini sesuai dengan kaidah Fiqih yang ada, dan memang sedari dulu politik NU tidak pernah benar-benar keluar dari landasan yang ada dalam Fiqih.

Keywords

Nahdlatul Ulama, Pemerintahan, Politik, Pragmatisme

Article History

Received September, 5
Revised November, 19
Accepted December, 26
Published December, 28

Corresponding Author

Aji Sakti Hidayatullah.
Program Studi Ilmu
Pemerintahan, Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah
Tangerang, Jl. Perintis
Kemerdekaan I No.33

Pendahuluan

Dalam dunia politik kontemporer, Nahdlatul Ulama terlihat semakin dekat dengan kekuasaan pemerintah. Kedekatannya dengan PKB dan Jokowi membuat NU semakin tenang dan perkasa, sehingga banyaknya elite senior NU yang menduduki posisi strategis birokrasi, korporasi dan BUMN (Fealy, matamatapolitik.com, 2020). Jika menilik kebelakang, NU pernah menjadi partai politik yang mencalonkan diri dalam pemilu. Kegembiraan NU saat menjadi calon dalam pemilihan umum 1955 mengilhami NU bahwa ia tidak bisa lepas dari konstelasi politik. Corak dan ragam ketika para kader NU menduduki kursi politik kala itu selalu terbayang hingga sekarang (Setiawan, 2022). NU selalu mengalami perubahan konstruksi dan orientasi; dilahirkan sebagai organisasi social keagamaan, tetapi tumbuh kembang dan aktif dalam arena politik. Perubahan

tersebut memperlihatkan bahwa NU adaptif terhadap situasi, kendati demikian hal tersebut memperkuat anggapan kalau NU tidak berpendirian, inkonsisten, dan bersifat dualistic (Iqbal, 2019).

Meski demikian, NU selalu bergerak permisif dan turut berperan dalam membangun bangsa, kejelasannya dalam memposisikan diri sebagai organisasi social keagamaan membuat NU memiliki kekuatan politik dengan basis massa yang dekat secara structural, kultural, dan intelektual. Sehingga, NU tidak bisa dilepaskan dari fragmentasi politik nasional. NU bukanlah gerakan politik, melainkan kekuatan politik. (Karim, 1995; Chumaedi, 2006; Mahatma, 2017; Basri, 2019; Haris & Dardum, 2021). Sebagai Jam'iyah sosial keagamaan, NU seharusnya tidak memasuki ranah sistem politik. Keterlibatan politik menurut Khittah merupakan keterlibatan individu, bukan organisasi. Membenarkan keterlibatan individu dalam politik, baik atas nama individu atau organisasi, sangat kompleks. Namun perlu diingat bahwa ketika seorang pemimpin organisasi memasuki wilayah secara langsung atau tidak langsung, organisasi tersebut berada dalam gejolak politik. Sungguh ironis jika era NU memproklamkan independensinya terhadap politik pasca kembalinya ke Kittah 1926, ternyata masih berselingkuh dengan partai politik dan elit partai (Syam, n.d.).

Dalam situasi saat ini, peran NU sebagai organisasi sosial keagamaan bukan berarti apolitis. Tidak dapat dipungkiri bahwa NU masih memiliki kekuatan yang cukup besar, dekat dengan kekuasaan, dan memiliki sejumlah besar tokoh dan Elite NU yang duduk pada posisi esensial pemerintahan daerah maupun pusat. Fenomena terpilihnya Ma'ruf Amin menjadi cawapres Joko Widodo dapat menjadi sumber daya tawar sekaligus ancaman bagi ikatan sosial politik internal NU (Izad, Asumsi.co, 2018). Argumentasi ini meyakini bahwa oportuniste yang dihadirkan merupakan strategi untuk mencegah NU terlibat dalam pengambilan kebijakan yang dapat merugikan NU sendiri (Chalik, 2011).

Banyak yang menilai aksi politik Nahdlatul Ulama (NU) itu pragmatis. Dalam artian tindakan politik NU didorong oleh motivasi untuk memperoleh status dan kekuasaan. Kepraktisan politik NU dipandang oleh sebagian ahli berasal dari pandangan politik dasar Sunni yang lebih mementingkan stabilitas dan berusaha sebaik mungkin untuk menghindari *chaos* (Hamdi, nasional.sindonews.com, 2019). Dalam banyak kasus, pengurus NU bahkan pimpinan NU pun bingung saat terjun ke dunia politik karena tidak memiliki pijakan atau referensi dalam berpolitik. Referensinya banyak, pengalamannya numpuk, tapi catatan pengalaman-pengalaman itu berserakan, kurang terdokumentasi, dan tidak mudah ditemukan, akhirnya banyak kader NU berpolitik tanpa rujukan, tradisi, dan pijakan. Ia tidak dapat memainkan peran yang menentukan dalam membentuk strategi dan kebijakan nasional (Mun'im, 2011).

Terdapat beberapa kajian pustaka terkait relasi politik NU, baik secara Elite, Lembaga, maupun afiliasi parpol yang coba di analisis dan topik-topik yang di mapping. Artikel pertama yang ditulis (Febrina et al. 2014) memaparkan bahwa Nahdlatul Ulama dalam kontestasi electoral di level lokal mengambil posisi sebagai organ perantara yang independen, membantu rakyat dalam mewakili kepentingan mereka antara urusan publik dan negara. Di sini NU tidak dipandang sebagai organisasi keagamaan yang oportunis, sehingga memiliki tempat tersendiri di publik. Artikel selanjutnya yang ditulis oleh (Husna & Febriyanti, 2017), menjelaskan bahwa NU adalah Orma (organisasi agama) paling besar di Indonesia, yang menghidupkan kembali tradisi keagamaan Sunni. Kendati demikian, dari sisi kebijakan nasional, corak budaya NU tidak menyimpang dari prinsip tasammuh (toleransi), tawasuth (moderasi), tawazun (serasi dan seimbang), dan ta'adul (adil). Sikap NU ini juga bersifat al-ghayah wa al-wasa'il, yaitu memanfaatkan politik untuk tujuan pembangunan kebangsaan.

Terakhir, artikel yang ditulis oleh Muhammad (2015). ini meng-*highlight* dinamika politik NU dari perspektif antropologis, historis, dan sosiologis. Berlandaskan fakta, dinamisasi politik NU tampaknya telah menjangar berbagai aspek, termasuk faktor agama, budaya, dan politik. NU yang

terlibat dalam politik, kemudian mendeklarasikan keluar dari perpolitikan. NU yang adaptif terhadap perubahan zaman dengan kontekstualisasi gerakan politik yang luwes membuatnya tetap eksis ditengah transfigurasi politik masyarakat sehingga membuatnya menjadi Orma (organisasi agama) terkemuka. Dari segi kebaruan, belum ada penelitian yang membahas atau menguraikan tentang sepak terjang organisasi NU dalam menjalankan misi politiknya pada zaman Jokowi Widodo periode pertama dan kedua, sehingga penulisan ini memiliki hal baru yang menarik untuk dikaji. Nahdlatul Ulama sendiri sering disebut sebagai entitas pragmatis karena sangat pro-pemerintah di masa lalu dan beberapa tahun terakhir, terutama pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Untuk melihat secara lengkap, holistik dan universal antara relasi NU dan politik. Fenomena ini menarik. Sebab, di antara generasi dengan warna yang berbeda-beda karakteristik dan tipe NU sangat terpancang sebagai kelompok sosial keagamaan, namun juga hadir mewarnai agenda politik diberbagai lini di tengah transformasi politik.

Pragmatisme sendiri dapat dipahami sebagai aliran yang mengajarkan bahwa apa yang terbukti benar dengan hasil yang praktis dan bermanfaat adalah benar (Hadinatha, 2018; Herman, Robyan, & Bafadal, 2022). William James menjelaskan bahwa pragmatisme adalah nama baru untuk beberapa ide lama. Dalam hal pragmatisme, manfaat dari hasil teoretis bukanlah hal yang diperoleh dari prinsip-prinsip abstrak, melainkan prinsip-prinsip objek konkret yang dapat mengarahkan kehidupan untuk terus ke depan (Prayoga, 2018). Sebuah gerakan filosofis yang menganggap makna dan kebenaran dari setiap ide sebagai fungsi dari konsekuensi praktisnya. Hegel menjelaskan tentang poin penting dari pragmatisme adalah bahwa dasar catatan kebenarannya yang berubah pada konsepsi yang berubah secara alamiah, baik untuk tujuan maupun metodenya (Renault, 2013). Berdasarkan hal ini, tujuan berpikir kita adalah untuk mencapai hasil akhir yang dapat memajukan hidup kita dan menjadikannya lebih bermanfaat (Wasitohadi, 2012). Adapun menurut Ekowati, politik pragmatis adalah perilaku, perspektif, dan perbuatan yang memperhitungkan semua kebutuhan dan political interest guna memperoleh otoritas, manfaat, dan kemenangan.

Terdapat dua jenis pragmatisme dalam politik, yaitu pragmatisme positif dan negatif. Pragmatisme positif memakai metode praktis serta konkret demi menyelesaikan permasalahan. Pragmatisme negatif, disisi lain, menggunakan metode transaksional (Ekowati, 2019). Pragmatisme, kemudian dapat diperkuat dengan teori pilihan rasional James S. Coleman, aktor dan sumberdaya merupakan unsur yang menggambarkan sebagai berikut: Dalam perilaku sosial yang melibatkan minimal dua orang. Keduanya memiliki sumber daya yang diinginkan atau dibutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Kerjasama, saling ketergantungan, dan perilaku sistematis muncul dari sumber daya yang diinginkan pemangku kepentingan lainnya (Candra, 2018). Menariknya dalam penelitian ini, penulis melihat adanya kepraktisan rasional yang sistematis di dalamnya.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif. Maka, karakteristik penelitian kualitatif perlu diterjemahkan ke dalam konteks penelitian kepustakaan. Relokasi *setting* outdoor ke perpustakaan, mengkonversi pekerjaan wawancara dan observasi menjadi Analisa tulisan dan bacaan (Hamzah, 2020). Penjelasan di atas memberi alasan mengapa peneliti dalam hal ini tidak turun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi atau wawancara selayaknya penelitian kualitatif pada umumnya. Dengan demikian peneliti menggunakan pendekatan ini akan menelusuri data secara mendalam, kemudian mengkaji literature yang termaktub pada jurnal, buku ataupun sumber online lainnya yang representative serta relevan untuk melengkapi analisis dari penelitian. Data yang terkumpul kemudian disaring, dan dikategorisasi lalu dihubungkan satu sama lain sampai akhirnya diperoleh

data untuk disimpulkan (Chumaedi, 2006). Secara garis besar tujuan penelitian ini dibagi menjadi tiga poin. 1) Discovery, di mana data yang didapat dari penelitian masih tidak umum. 2) verification, di mana data yang digunakan untuk menjawab keragu-raguan pada pandangan tertentu; dan 3) development, di mana data yang didapat dipergunakan untuk mendalami dan memperluas wawasan yang ada (Adhari & Suntara, 2020).

Hasil dan Pembahasan

Relasi Nahdlatul Ulama dengan Politik

Nahdlatul Ulama (NU), selaku organisasi besar Islam di Indonesia sangat terlibat dalam mempromosikan moderatisme Islam. Lahirnya NU sebagai respon terhadap tumbuh kembangnya politik internasional. Perkembangan tersebut menjadi postulat terbentuknya NU, realitas sosial dan keagamaan hanyalah sebagian dari alasan pembentukan organisasi ini (Fuad, 2020). Sebagai ormas, NU memiliki keunikan dibandingkan ormas Islam lainnya. Salah satu peningkatannya terlihat pada dinamika peran NU dalam mengelola perubahan sosial politik yang terjadi di Indonesia. NU bersifat defensif, oportunistik, dan terkadang bahkan radikal (Saepulah, 2021).

Perjalanan Nahdlatul Ulama awalnya banyak terlibat dalam politik praktis, namun tidak lepas dari keterlibatannya dalam proses politik langsung maupun tidak langsung. Keberadaan Nahdlatul Ulama sebagai partai dari tahun 1952 hingga 1973, menunjukkan pengalaman panjangnya di wajah politik Indonesia dengan begitu dinamis (Man, 2018). Pada saat itu NU telah menceburkan dirinya kedalam politik praktis yang mana secara tidak sadar dapat menggradasi semangat keagamaan yang menjadi cita-cita awal. Perjuangan politik NU bukan hanya karena mempertahankan pemikiran, tetapi juga politik merupakan jalan perjuangan yang sangat legit dalam hidup bernegara. Sedari dulu, banyak Elite muda NU yang condong berkiprah dalam konteks politik ketimbang aktif mensyiarkan agama. Hal demikian dapat dilihat dari kiprah politik Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam yang tidak berimbang dengan performa sosial dan keagamaan, namun demikian satu hal yang perlu dicermati bahwa terlibatnya NU kedalam politik merupakan representasi cita-cita politik umat muslim.

NU memiliki tiga bagian dalam tujuan politiknya, masing-masing terkait erat dengan visi keagamaannya. Pertama, penyaluran hibah dari pemerintah kepada kaum nahdliyin sangat meningkatkan fasilitas pendidikan dan keagamaan. Kedua, NU dan afiliasinya berusaha mendapatkan peluang bisnis dari pemerintah. Tujuan ketiga adalah mendapatkan posisi bagi anggota NU dalam birokrasi (Fealy, 2009). Hal tersebut yang menjadi semangat moral perjuangan NU harus mendukung pengembangan peran politik yang lebih dari sekedar politik institusional sehingga keterkaitan langsung dengan politik praktis dihilangkan. Menurut Gus Dur, NU harus memainkan peran politik yang lebih baik dalam transformasi dan perubahan masyarakat. Nahdlatul Ulama harus menyiapkan kadernya untuk merangkul masa industri tanpa harus kehilangan landasan religiusitasnya, dan NU harus memberikan lebih dari sekedar pijakan politik kepada kadernya. Dengan kata lain, mengedepankan objek ketimbang subjek (Karim, 1995).

Gaya NU dalam berpolitik terlepas dari background pesantren, dan lembaga pendidikan agama yang memberi kesan konservatif, menjalar secara kultural. Old-School, ulet, dan sangat menjaga tradisi Islam. Oleh karenanya, motif politik yang digunakan adalah politik komunalisme santri dan kalangan nahdliyyin lainnya, di mana sikap rasionalisme tidak terlalu dominan. Hal ini karena NU mengandalkan monetisasi tradisi budaya, patronase ulama, dan santri, menjadikan NU sebagai induk daripada pesantren tersebut. Karena kausalitas inilah yang membuat NU berinteraksi dengan budaya dan politik secara fleksibel. Islam tradisional menjadi identitas dan karakter politik NU (Raharjo Jati, 2012).

Pragmatisme Politik Nahdlatul Ulama

Pragmatisme, sebagai cara mengembangkan pranata sosial yang diperlukan untuk mengusahakan kepentingan bersama, memberikan landasan intelektual yang rasional untuk nilai-nilai kebenaran bagi manusia dengan mengedepankan keterbukaan pikiran (Giri, 2020). Pragmatisme dalam dimensi politik adalah perilaku, perspektif, dan perbuatan yang memperhitungkan semua kebutuhan dan political interest guna memperoleh otoritas, manfaat, dan kemenangan. Keputusan NU untuk kembali berkhittah merupakan upaya untuk menjauhkan NU dari satu partai politik. Putus hubungan dengan partai politik merupakan hak penting untuk dijalankan jika NU ingin merebut kembali vitalitas dan visinya dalam menjalankan kegiatan pendidikan, sosial, dan keagamaan. Dengan demikian NU membebaskan warganya untuk mengekspresikan semangat berpolitiknya ke partai manapun (Daud, 2021). Jika kita melihat sejarah keterlibatan NU dalam politik, kita dapat melihat bahwa pertimbangan politiknya selalu didasarkan pada konteks dan situasi politik yang berkembang. Akibatnya, hubungan NU dengan pemerintah (negara) sering kali renggang dan saling menguntungkan. Sederet nama elite NU juga turut menghiasi wajah pemerintahan Jokowi.

Selain Gus Dur yang menjadi presiden keempat, para petinggi NU tidak pernah memainkan peran penting dalam politik setelah jatuhnya Suharto. Meskipun politisi yang berafiliasi dengan NU kadang-kadang mendapatkan pengangkatan dalam Kabinet, mereka terutama terbatas pada Kementerian Agama. Di bawah Kepresidenan Abdurrahman Wahid, Kader NU Muhammad Tolchah Hasan diangkat menjadi Menteri Agama. Di bawah Presiden Megawati, Said Agil Husin Al Munawar mengambil posisi itu, dan antara 2004 dan 2009, di bawah pemerintahan SBY, Menteri Agama adalah Muhammad Maftuh Basyuni. Suryadharma Ali, juga anggota NU tetapi politisi PPP, adalah Menteri selama pemerintahan kedua SBY (Saat & Dewayanti, 2020).

Terlibatnya elite NU (Kyai dan Ulama) dalam politik praktis memang sudah menjadi akar yang kuat jauh sebelum Republik ini merdeka. sebagai contoh beberapa tahun terakhir. Pada pilpres 2014, secara gamblang NU tetap berpegang pada Khittah, tidak memberikan dukungan pada calon manapun dan melakukan politik langsung mengatasnamakan jam'iyah. Kendati demikian, para tokoh NU, saling berkoalisi untuk mendukung diantara calon-calon yang akan dimenangkan. Kedudukan NU secara resmi diungkap dalam taushiyah lima poin yang ditandatangani KH. Said Aqil Sirad, KH. Marsyudi Syuhud, KH. Mustofa Bisri, dan KH. A. Malik Madani. intisari dari taushiyah itu adalah ketikutsertaan warga NU dalam pilpres adalah ibadah, jika dilakukan dengan benar, tidak melakukan politik uang, dan juga harus menjaga ukhuwah agar pilpres dapat berjalan dengan lancar dan damai (Ridwan, 2020).

Mengingat kuatnya jalinan NU dengan penguasa, terkadang kita dapat menemukan wajah elit Nahdlatul Ulama, seperti kemitraan yang harmonis, hubungan timbal balik, dan hubungan akomodatif (Sanusi & Gumilar, 2019). Maka pada kabinet Jokowi-Jk tidak heran apabila diisi oleh beberapa nama yang memiliki latar belakang NU. Seperti, Hanif Dhakiri (Menaker), Marwan Ja'far (Menteri PDTT) yang kemudian diganti oleh Eko Putro Sandjojo, Lukman Hakim (Menag), Mohamad Nasir (Menrisdikti), dan Khofifah Indar Parawansa (Mensos) (Khumaini, merdeka.com, 2014). Hanya beberapa saja posisi menteri yang dijabat oleh Elite NU atau dari partai yang berafiliasi dengan NU, sebagian besar kemudian diisi oleh tenaga profesional dan partai yang berada diluar koalisi. Dari gambaran singkat ini, baik kelompok manapun, apabila memiliki kapasitas dari berbagai keahlian, semua akan memiliki *chance* yang sama. Jokowi lebih cenderung bermain seimbang dalam politik, hal tersebut dapat dilihat dari komposisi menteri dalam kabinet. Dan Jokowi perlu orang-orang NU untuk dapat menjaga keseimbangan itu.

Kemudian Pilpres 2019 kemarin, menjadi babak kedua bagi petinggi NU dalam memainkan peran penting dalam politik, keputusan Jokowi untuk menunjuk Kyai Ma'ruf entah bagaimana membawa NU kembali sebagai pesaing politik yang serius. Nama lain sebelum ditunjuknya Kyai

Ma'ruf adalah Mahfud MD, yang juga menjunjung tinggi orientasi NU, nama Mahfud sangat kencang di media dan digadang menjadi calon kuat wapres Jokowi pada pilpres 2019. Gagalnya Mahfud MD menjadi pendamping Joko Widodo dikarenakan adanya intervensi dari elite PBNU. Terlebih lagi elite tersebut memperingatkan, apabila Wapres yang terpilih sebagai pendamping Joko Widodo bukan dari orang NU, maka Nahdlatul Ulama enggan menjamin secara moral kepada pemerintahan yang sah. Bahkan Mahfud menuturkan bahwa dirinya sengaja dijegal oleh Ketum PBNU Said Aqil, Ketua Harian PBNU Robikin, Ketum PKB Cak Imin, dan Ketum PPP Romahurmuziy (Ridhoi, tirtto.id, 2018).

Keikutsertaan tokoh NU dan NU dalam kegiatan politik praktis yang diselenggarakan dan dimobilisasi oleh Ketua PKB (Muhaimin Iskandar) tidak sesuai dengan jiwa, semangat, dan jiwa. semangat Khittah 1926. Muhaimin Iskandar menggunakan taktik lain untuk mendapatkan dukungan dari komunitas NU. Keterlibatan Kiai dan tokoh NU menunjukkan betapa kegiatan politik praktis tumpang tindih dengan Khittah 1926. Saat Ma'ruf jadi pilihan sebagai Cawapres Joko Widodo, PBNU juga menawarkan dukungan moral dan politik kepada calon presiden bernomor urut 01 tersebut dan berharap pasangan tersebut memenangkan Pilpres 2019. Hal ini menguraikan mengapa para pengurus besar NU memasang badan NU dan menyodorkan *support* moral dan politik kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden Jokowi Ma'ruf. Dengan bahasa lain, PBNU secara gamblang mendukung pasangan calon nomor urut 01. Selanjutnya, Ma'ruf Amin, cawapres, mengajak dan menyeru para pengurus NU di wilayah Banten untuk aktif melibatkan dan memfungsikan Kiai NU dalam berkampanye untuk memenangkan Joko Widodo dalam pemilihan presiden 2019. NU tampaknya terbawa-bawa dan terlibat dalam kegiatan politik praktis (Ismail, 2020).

Apabila dilihat dari sudut pandang lain, terjun bebasnya PBNU pada konstelasi politik adalah karna gejala Pilpres 2019, termasuk fase pra-kampanye, adalah mengkristalnya SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) dieksploitasi sebagai bahan bakar propaganda politik. Indikasi kedua ialah maraknya *hate speech* yang marak di masyarakat beberapa tahun sebelum dan selama Pilpres 2019. Akibat negara ini, kondisi sosial di Indonesia rentan Ditunggangi akan kepentingan politik tersendiri yang membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ardipandanto, 2020). NU memiliki kemampuan rekonsiliasi yang bisa meredam konflik yang kemudian NU mengambil peran disana dengan berijtihad dapat menjaga keseimbangan sosial politik, dengan berlandaskan pada Qoidah *Dar'ul Mafasid Muqoddamun Ala Jalbil Mashalih* (Mencegah kerusakan lebih penting ketimbang mengambil keuntungan).

Dalam tulisannya Sonny, dengan judul "Nilai Strategis Kefigurasi Kh Ma'ruf Amin Sebagai Pasangan Joko Widodo Pada Pemilihan Presiden" (2019) menjelaskan bahwa, memang pilihan yang sangat tepat dan rasional apabila sosok NU digaet untuk bertanggung pada pilpres kemarin, Figur Ma'ruf Amin sanggup mengkonsolidasikan suara nahdliyin secara kultural dan struktural. Ia dinilai sebagai sosok yang cakap dalam memecahkan permasalahan esensial, seperti serentetan konflik SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) di Indonesia. Kita tahu bahwa pada akhirnya NU tidak mendapatkan posisi apapun di Kabinet Indonesia Maju. Peran Menteri Agama yang biasa dijabat kader NU diberikan kepada purn. Jenderal TNI Fachrul Razi (Nathaniel, tirtto.id, 2022). Pernyataan ini kemudian dipertegas oleh Gus nadir yang mengatakan bahwa, elite NU tidak *euforia* berlebihan atas apa yang didapat, dan tidak murung atas apa yang hilang, inilah corak keagamaan yang nyata dalam politik NU (Hosen, 2019). Kemudian pada tahun 2020-2021, barulah elite NU mendapatkan posisi dalam jajaran pemerintah. Misalnya, Ketum PBNU Aqil Siradj diangkat menjadi Komisaris PT.KAI (Persero), kemudian Ketum GP Ansor Gus Yaqut Cholil dipilih menjadi Menag menggantikan Fachrul Razi.

Sikap politik yang NU tempuh membuat para elit-elit NU mendapatkan keuntungan dari frame politik NU ada yang masuk dalam legislative, eksekutif maupun lembaga-lembaga tinggi

Negara lainnya. Mereka memainkan peranannya secara pragmatism, makanya yang dihasilkan dalam politik NU selalu tidak mendapatkan keuntungan politik yang besar. Masih banyak yang tidak bisa dikelola oleh NU dalam politik, NU terabaikan akan kebesarannya, karena minimnya rasionalisasi atas peran dan fungsi politik dalam NU.

Adapun tentang Khittah NU yang disebut juga Khittah 1926, Mukhtar 1984 juga merinci landasan pemahaman beragama kaum NU, sikap sosial, dan upaya yang dilakukan NU dalam bidang ilmu pengetahuan, dakwah, dan peningkatan kualitas hidup umat. Dinyatakan antara lain bahwa NU mendasarkan pemahaman keagamaannya pada sumber: Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma', dan Al-Qiyas. Kemudian NU menggunakan pendekatan (Al-Madzhab) dalam bidang keimanan, mengikuti ideologi Ahlussunah Waljama'ah yang dibawa oleh Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, dalam bidang fikih mengikuti salah satu dari empat mazhab, dan dalam bidang tasawuf, berkiblat pada Imam Baghdadi dan Imam Al-Ghazali.

Sementara itu, perumusan Khittah NU bertepatan dengan perubahan signifikan dalam sejarah organisasi NU. Sejak 1952 NU telah bertransformasi menjadi organisasi politik. Bahkan pada pemilu 1955, NU menjadi salah satu partai politik yang memenangkan pemilu. Kemudian pada 1984, NU tak lagi harmonis dalam ruang politik. Terlebih banyak lembaga-lembaga, madrasah dan pondok pesantren yang tidak terurus karena atensi dan waktu para kyai, menjadi bias untuk kepentingan politik. Kemudian NU dalam kepemimpinan Gus Dur, mendeklarasikan bahwa NU bukan lagi organisasi politik. Deklarasi tersebut juga disebut sebagai langkah *Kembali ke Khittah 1926*, sehingga Khittah NU sering diartikan secara sederhana bahwa NU tidak lagi terlibat dalam politik praktis. Namun, tujuan khittah NU seharusnya lebih dari itu (Anam, 2014). Membicarakan politik Nahdlatul Ulama yang layak dan tidak layak tidak sama dengan membahas nilai-nilai moral. Namun, untuk organisasi setingkat NU harus terintegrasi penuh dalam kehidupan bangsa dan negara. NU memang layak menggunakan segala cara yang ada untuk menciptakan kehidupan yang adil dan makmur, termasuk menempuh jalur politik. Politik yang baik, elegan, dan berwibawa. Bukan hanya benturan kepentingan dan taktik papan catur.

Secara spesifik, pengembangan landasan politik terangkum menjadi sembilan pedoman berpolitik warga NU. Itu termasuk politik yang baik, kesadaran berbangsa, bertanggung jawab, beretika, bermoral, komunikatif, kerukunan, dan kemandirian. Pluralisme di Indonesia harus dilestarikan secara utuh. NU telah melakukan ini sejak dahulu kala sebagai Civil Society (Arief Auly, 2013). Kembali ke Khittah menciptakan peluang luar biasa bagi organisasi ini untuk muncul sebagai tulang punggung Civil Society masa depan. NU dan lembaganya berupaya menapaki jalan baru yang telah dirintisnya, dengan orientasi mendahulukan kesejahteraan umum, ditopang oleh tiga pilar ukhuwwah Islamiyah, wathoniyah, dan basyariyyah, dan visi politik inklusif Islam sebagai *rahmatan lil' alamin*. Pendidikan kewarganegaraan, diskusi kontekstual isu-isu keagamaan, kajian dan penelitian sosial, pengabdian masyarakat dan advokasi merupakan contoh program konkrit (Hikam, 2000).

Semangat Khittah NU menjadi kekuatan yang signifikan dalam kehidupan bernegara di negeri ini. Khittah NU berharap dapat melahirkan aktivis-aktivis NU yang cakap untuk mengabdikan pada bangsa dan negara. NU tidak akan menjadi kecil atau menyusut, tetapi Khittah NU akan mengubah NU menjadi organisasi yang mampu beradaptasi dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Politik NU sangat cemerlang karena menerima partisipasi semua pihak dan menyatukan mereka dalam sebuah platform yang disebut NU (Sumarta, 2022). Sikap ini pula yang dilakukan Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU yang tidak ingin menjadikan NU satu corak saja, terlihat dari komposisi PBNU dalam periodenya yang menghadirkan kadernya dari berbagai partai (pinterpolitik.com, 2022). Yang kemudian hal ini akan mempermudah pengawasan PBNU terhadap masuknya kepentingan politik yang mencoba masuk dalam tubuh NU (Permana, era.id, 2022).

Upaya Gus Yahya untuk menghidupkan kembali Gus Dur bertujuan untuk melanjutkan visi yang telah dilakoni (Triono, 2022). NU menjadi kekuatan moral untuk memperkuat jaringan kultural dan struktural sebagai Civil Society yang mandiri, menjadikan NU sebagai gerakan agama, pendidikan, sosial dan budaya. Menjaga keharmonisan, menjadi titik tengah antargolongan, etnis, dan agama. Sebagai kekuatan Civil Society, NU harus berada di garis depan untuk mengikhtikarkan kepentingan masyarakat. Menimbang kapasitas NU tidak hanya dalam segmen politik, dan kebutuhan kaum nahdliyin bukan cuma dalam segmen politik saja. Peneguhan perekonomian, agama, dan kelembagaan lainnya harus dikerjakan secara betul-betul oleh pada kader-kader NU. Dengan demikian, penting untuk dicatat bahwa NU bukanlah medium politik, lapangan *business*, atau sarana untuk mengejar kepentingan individu atau kelompok.

Kesimpulan

Nahdlatul Ulama memiliki peran yang tidak bisa dipisahkan dalam sejarah Indonesia, secara holistik baik NU secara lembaga, ataupun Elitenya yang berafiliasi dengan ParPol, masih terus melakukan perjuangannya di jalur politik. Dalam beberapa kasus penempatan kader NU di cabinet, itu berdasarkan pada pilihan rasional. Kemudian, Pilpes 2019 kemarin menunjukkan betapa terpampang jelasnya pragmatism dalam tubuh NU, fenomena ini jelas mengagetkan banyak kalangan, NU yang sudah final dengan Khittahnya malah secara gamblang mendukung salah satu jagoan politiknya. Secara teori memang benar NU melakukan langkah pragmatisnya dalam politik. Namun, disisi lain juga NU melakukan semua ini sesuai dengan Qoidah Fiqih yang ada, dan memang sedari dulu politik NU tidak pernah benar-benar keluar dari landasan yang ada dalam Fiqih. Konsekuensi kembali ke Khittah memang harus terus dijalankan, NU tidak boleh lagi digerus oleh kepentingan yang pragmatis.

Referensi

- Adhari, N. R., & Suntara, R. A. (2020). Meningkatkan Kesadaran Bela Negara Melalui Peran Nahdlatul Ulama Dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia. *JIPIS*, 29(2).
- Anam, A. K. (2014). Makna Khittah NU. *Nu.or.Id*. Retrieved from <https://www.nu.or.id/risalah-redaksi/makna-khittah-nu-sl5Tx>
- Ardipandanto, A. (2020). Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme [The Impact of Identity Politics On President Election 2019: Populism Perspective]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 11(1), 43–63. <https://doi.org/10.22212/jp.v11i1.1582>
- Arief Auly, M. (2013). *Unpolitical Politic: Arab Politik Nahdlatul Ulama* (pp. 1–3). pp. 1–3. nu.or.id.
- Arroisi, J., Putra Perdana, M., & Reza Hutama Al Faruqi, A. (2020). Pembaharuan Pemikiran Islam Model Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. *Jurnal Islam Nusantara*, 04(02), 172–188. <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i2.223>
- Basri, Y. (2019). *Dinamika Kultur Politik NU: Studi Kiai Kbos Masa Pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Candra, T. (2018). Aktor dalam Timbangan Pilihan Rasional | Sanglah Institute. *Sanglah-Institute.Org*. Retrieved from <https://www.sanglah-institute.org/2018/09/aktor-dalam-timbangan-pilihan-rasional.html>
- Chalik, A. (2011). *Nahdlatul Ulama dan Geopolitik Perubahan dan Kesenambungan* (X). Sleman: Impulse & Buku Pintar Yogyakarta.
- Chumaedi, A. (2006). *Nu Dan Civil Society: Studi Atas Paradigma Khittah 1926 (1984-2004)*. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Daud, S. (2021). *Re-Orientasi Politik Nu Pada Masa Orde Baru*. Bandar Lampung: Pusaka Media.

- Ekowati, E. Y. (2019). Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan dan Calon Tunggal dalam Pilkada. *Jurnal Transformative*, 5(1).
- Fealy, G. (2009). *Ijtihad politik ulama : sejarah NU 1952-1967* (IV). Yogyakarta: LKiS.
- Fealy, G. (2020). NU dan Jebakan Politik: Masa Depan, Kedekatan dengan Jokowi, dan PKB. *Matamatapolitik.Com*. Retrieved from <https://www.matamatapolitik.com/news/analisis-nu-dan-jebakan-politik-masa-depan-kedekatan-dengan-jokowi-dan-pkb>
- Febrina, R. H., Mustika, B. U., & ... (2014). Nahdlatul Ulama: Bebas untuk Oportunis? Menelisis Kontestasi Politik pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banyumas Periode 2008 dan 2013. ... *Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*. Retrieved from <https://journal.ugm.ac.id/jsp/article/view/13131>
- Fuad, A. J. (2020). Akar Sejarah Moderasi Islam Pada Nahdlatul Ulama. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 31(1), 153–168. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v31i1.991>
- Giri, A. K. (2020). *Pragmatism, Spirituality and Society New Pathways of Consciousness, Freedom and Solidarity*. Palgrave Macmillan.
- Hadinatha, M. F. (2018). Jejak Pragmatisme dalam Politik di Indonesia (Era 2009 – 2017). *KALIMAH*, 16(2). <https://doi.org/10.21111/klm.v16i2.2872>
- Hamdi, A. Z. (2019). Jejak Oposisi Politik Nahdlatul Ulama. *Nasional.Sindonews.Com*. Retrieved from <https://nasional.sindonews.com/berita/1455567/18/jejak-oposisi-politik-nahdlatul-ulama>
- Hamzah, A. (2020). *Metode penelitian kepustakaan (library research) : kajian filosofis, teoretis dan aplikatif*. Malang: Literasi Nusantara.
- Haris, A., & Dardum, A. (2021). Kiai NU dan Politik (Keterlibatan Kiai Nu Jember Dalam Kontestasi Pilpres 2019). *Fenomena*, 20(1), 91–114. <https://doi.org/10.35719/fenomena.v20i1.51>
- Herman, Robyan, & Bafadal. (2022). Pragmatisme Dan Politik Pemilu. *Jurnal Mentari Republika*, 2(2).
- Hikam, A. (2000). *Islam, Demokratisasi, dan Pemberdayaan Civil Society* (Cet-1). Jakarta: Erlangga.
- Hosen, N. (2019). Posisi NU dan Keseimbangan Sosial-Politik. *Ltnujabar.or.Id*, pp. 1–5. Retrieved from <https://ltnujabar.or.id/posisi-nu-dan-keseimbangan-sosial-politik/3/>
- Husna, A., & Febriyanti. (2017). Sikap Keagamaan Moderat Nahdlatul Ulama (NU) dan Komitmennya dalam Mempertahankan Empat Pilar Kebangsaan. *Seminar Nasional PKn-Unnes 2017- Penguatan Spirit Kebangsaan Di Tengah Tarikan Primodialisme Dan Globalisme*, 15–24.
- Iqbal, M. M. (2019). Nahdlatul Ulama Dalam Pusaran Politik: Sebuah Otokritik Orientasi NU Dalam Politik Perspektif Insider. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP)*. Retrieved from <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/JISoP/article/view/4852>
- Ismail, F. (2020). *NU moderatisme dan pluralisme* (Cetakan Pertama; Nurr, Ed.). Yogyakarta: IRCiSoD.
- Izad, R. (2018, September 25). Politik Nahdlatul Ulama | Asumsi. *Asumsi.Co*. Retrieved from <https://asumsi.co/post/2070/politik-nahdlatul-ulama>
- Karim, A. G. (1995). *Metamorfosis NU dan Politisasi Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS bekerja sama dengan Pustaka Pelajar. Retrieved from www.muslims.net/KMNU
- Khumaini, A. (2014). Deretan Menteri dari NU di Kabinet Kerja Jokowi-JK. *Merdeka.Com*. Retrieved from <https://www.merdeka.com/politik/deretan-menteri-dari-nu-di-kabinet-kerja-jokowi-jk.html>
- Mahatma, M. (2017). Paradigma Politik Nahdlatul Ulama (NU) dalam Bernegara. *Mawa'izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan* Retrieved from <https://www.lp2msasbabel.ac.id/jurnal/index.php/maw/article/view/695>

- Man, Y. L. (2018). Urgensi Nahdlatul Ulama dalam Pemerintahan Indonesia. *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik* Retrieved from <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarrah/article/view/2148>
- Muhammad, F. (2015). *Dinamika Pemikiran dan Gerakan Politik Nahdlatul Ulama*. 9(1).
- Mun'im, A. (Ed.). (2011). *Piagam Perjuangan Kebangsaan*. Jakarta: Setjen PBNU-NU Online.
- Nathaniel, F. (2022). Peran NU di Pilpres 2019 dan Balas Budi Jokowi. *Tirto.Id*. Retrieved from <https://tirto.id/peran-nu-di-pilpres-2019-dan-balas-budi-jokowi-goyS>
- Permana, E. (ed). (2022). Sejumlah Kader Partai Masuk Kepengurusan NU, Gus Yahya Pastikan Tak Istimewakan Parpol Tertentu - ERA.ID. *Era.Id*. Retrieved from <https://era.id/nasional/85256/sejumlah-kader-partai-masuk-kepengurusan-nu-gus-yahya-pastikan-tak-istimewakan-parpol-tertentu>
- pinterpolitik.com. (2022). NU Tidak Butuh PKB Lagi? *Pinterpolitik.Com*. Retrieved from <https://www.pinterpolitik.com/in-depth/nu-tidak-butuh-pkb-lagi/>
- Prayoga, A. (2018). Realitas, Politik, dan Pragmatisme. *Lsfogito.Org*. Retrieved from <https://lsfocigito.org/realitas-politik-dan-pragmatisme/>
- Raharjo Jati, W. (2012). Ulama dan Pesantren Dalam Dinamika Politik dan Kultur Nahdlatul Ulama. *Ulul Albab*, 13(1).
- Renault, E. (2013). The naturalistic side of Hegel's pragmatism. *Critical Horizons*, 13(2), 244–274. <https://doi.org/10.1558/crit.v13i2.244>
- Ridhoi, M. A. (2018). Bantahan dan Pengakuan Politikus atas “Nyanyian” Mahfud MD. *Tirto.Id*. Retrieved from <https://tirto.id/bantahan-dan-pengakuan-politikus-atas-nyanyian-mahfud-md-cSLW>
- Ridwan, N. K. (2020). *Ensiklopedia Khittah NU Jilid III* (Cetakan 1; A. M. Azzet, Ed.). Yogyakarta: DIVA Perss (Anggota IKAPI).
- Saat, N., & Dewayanti, A. (2020). Jokowi's Management of Nahdlatul Ulama (NU): A New Order Approach? *ISEAS – Yusof Isbak Institute*, 1–10.
- Saepulah. (2021). Dinamika Peran Gerakan Sosial Keagamaan NU Dalam Merespon Perubahan Sosial. *Jurnal.Stai-Mifda.Ac.Id*, 7(1). Retrieved from <http://jurnal.stai-mifda.ac.id/index.php/ar/article/view/12>
- Sanusi, A., & Gumilar, G. (2019). Peran Ma'ruf Amin Dalam Meraih Suara Masyarakat Muslim Pada Pemilihan Presiden 2019. *Lentera*, 3(1), 65–81. https://doi.org/10.1057/9781137436818_7
- Setiawan, H. (2022, June 18). NU dan Tantangan Pergulatan Politik Kekuasaan | The Columnist. *Columnist Intermediate Writer, Milennial Reader*. Retrieved from <https://thecolumnist.id/artikel/nu-dan-tantangan-pergulatan-politik-kekuasaan-2203>
- Sonny. (2019). Nilai Strategis Kefiguran Kh Ma'ruf Amin Sebagai Pasangan Joko Widodo Pada Pemilihan Presiden 2019. *Jurnal Renaissance*, 4(02), 541–550. Retrieved from <http://www.ejournal-academia.org/index.php/renaissance>
- Sumarta. (2022). NU Antara Politik Praktis dan Khittah. *Khulasah*, 4(1), 1–13. <https://doi.org/10.556556/kisj.v4i1.73>
- Syam, N. (n.d.). *Relasi NU dan Politik yang Fluktuatif*. Retrieved from https://www.academia.edu/5577918/politik_NU
- Triono, A. L. (2022, March). Di Pesantren Cipasung, Ketum PBNU Tegaskan Visi Menghidupkan Gus Dur. *Nu.or.Id*. Retrieved from <https://www.nu.or.id/nasional/di-pesantren-cipasung-ketum-pbnu-tegaskan-visi-menghidupkan-gus-dur-MIrBI>
- Wasitohadi. (2012). Pragmatisme, Humanisme dan Implikasinya Bagi Dunia Pendidikan di Indonesia. *Satya Widya*, 28(2).